

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan apa saja yang di dapat penulis dalam penelitian ini. Dengan objek utama BPBD Kab.Klaten lantas penulis memulai serangkaian perijinan birokrasi yang ada di pemerintahan Kab.Klaten, karena BPBD ini di bawah pemerintah kab.Klaten. Dan akhirnya penulis mendapat kesempatan untuk observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber dari BPBD Kab.Klaten. kegiatan observasi sendiri diatur jadwal oleh BPBD Kab.Klaten, sekaligus dapat langsung mewawancarai narasumber yang kebetulan semua narasumber yang sudah di pilih sebelumnya sedang berada di kantor.

Sesuai dalam teori manajemen komunikasi ada 4 kategori yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Yang pertama mendefinisikan dahulu masalah (defining public problem) mulai dari pra bencana apa saja hambatan-hambatan permasalahan di masyarakat dalam pengetahuan menghadapi bencana dan disini peran BPBD Kab.klaten. Lalu pada saat bencana tentu ini merupakan apakah BPBD serta masyarakat bersinergi menghadapi bencana. Selanjutnya yang kedua adalah rencana dan program apa saja yang di ambil untuk manangani kebencanaan (planning and programming). Lalu ketiga tentu implementasi (taking action and communication) dari apa yang sudah di rencanakan BPBD Kab.Klaten serta program-program apa saja yang dipakai untuk mendukung penanggulangan bencana ini. yang keempat atau yang terakhir ini yaitu evaluasi (evaluating the program) tentu ini sangat dibutuhkan bagi sebuah organisasi terutama BPBD dalam upaya menilai dan mencari apa yang kurang dari apa yang sudah dikerjakan.

A. Situasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kab. Klaten

Yang terjadi dalam setiap ada bencana sering kali ditemui informasi-informasi yang salah artinya info tersebut adalah hoax. Ini yang membuat masyarakat menjadi panik terhadap kepastian informasi tersebut. Hal yang sering ditemui adalah banyak spekulasi dari masyarakat sendiri dalam menilai bencana apa yang terjadi, misalnya dalam menilai bencana gunung merapi, apa itu dia meletus magmatik atau freatik. Seperti yang dikatakan asri staff Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menceritakan letusan merapi tahun kemarin.

“geger itu, terus di beberapa itu banyak, masih banyak spekulasi. Ini meletus magmatik apa freatik, atau eksposif, atau gimana kok engga ada tanda-tanda gitu. Waktu itu masih status normal. Terus beberapa ada yang konfirmasi ke BPBKG, beberapa ada yang melihat sosmed, beberapa juga monitor laporan dari teman-teman di atas.”

(Wawancara Asri, staf Kabid.Pencegahan dan kesiapsiagaan , 29 Agustus 2018)

Dari masalah tersebut BPBD Kab.Klaten sebenarnya sudah membuat sistem untuk mengatasi hal tersebut. Dari mulainya dibuat SOP penanganan bencana yang seperti apa, jadi artinya dalam setiap macam-macam bencana dibuat khusus SOP nya tersendiri. Karena untuk teknis dalam penanganan setiap bencana yang berbeda akan beda. Seperti yang dikatakan asri mengatakan dalam tindak lanjut penanganan BPBD mempunyai SOP sendiri.

“terus kemudian untuk pola tindak lanjut itu yang baru berpola. Kita harus seperti apa, oh SOP nya seperti apa. Jadi ada standar operating prosedurnya, nah yang kalau gunung merapi freatik, ya kita SOP nya yang pertama teman-teman relawannya harus kita pegang dulu, jadi penduduk yang di kawasan rawan bencana, kita harus banyak komunikasi kesana, supaya kalau terjadi apa-apa mereka itu, isu-isu itu tidak terlalu berkembang luas dan mereka merujuknya ke kita.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Dalam kasus merapi serta mereka yang disebut asri staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah masyarakat yang wilayahnya berada dekat dengan gunung merapi, lantas mereka termasuk dalam KRB (kawasan rawan bencana). Disini mereka sudah dibekali dengan pengetahuan bagaimana mereka koordinasi dengan masyarakat sendiri, evakuasinya bagaimana, memiliki akses sendiri dengan BPTKG dan segala macam penanganan bencana, jadi mereka sudah mandiri.

Dari segi sinyal telekomunikasi pun sangat dibutuhkan dalam pengkoordinasian. Ini memang harus diperhatikan untuk pemerintah dan penyedia operator. Karena bencana alam yang besar sering terjadi susah sinyal operator, bagaimana masyarakat untuk bisa koordinasi dengan BPBD Kab.Klaten maupun menghubungi sanak keluarga yang lain. Belajar dari pengalaman sebelumnya, BPBD Kab.Klaten melakukan terobosan yang lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan radio repiter atau HT. Seperti yang dikatakan pak haris.

“Ada itu ada hp kita kan ada repiter di sana repiter kita pasang di wilayah gunungkidul yang mana insya allah itu no problem katakanlah seperti di lereng merapi ini sinyal agak kurang bagus kadang-kadang selain operator telkomsel kalau kurang bagus jadi teman-teman kami yang ada di lapangan baik itu relawan kemudian pers segala macamnya ini lebih banyak menggantung kan pada radio tadi yah ht”

(Wawancara Haris, Kabid. Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Handie talkie atau singkatan HT ini harus memiliki ijin serta memiliki frekuensi yang lebih besar dan bebas. Alat inilah yang digunakan BPBD dengan relawan-relawan tersebar di berbagai wilayah yang termasuk rawan

bencana. Dan disini BPBD Kab.Klaten memberikan hibah kepada relawan tersebut, seperti yang diungkapkan asri.

“jadi kita ada hibah HT ke kawasan rawan bencana juga dan itu kita serahkan ke relawan desa setempat”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Untuk hal bencana alam yang besar seperti gunung merapi erupsi BPBD Kab.Klaten tidak bisa bergerak sendiri. Karena gunung merapi butuh ekstra tenaga dan pikiran lebih sebab bencana ini membuat serba bingung dan kondisinya. Berbeda dengan bencana yang tergolong ringan, ini dapat diatasi dengan baik oleh BPBD Kab.Klaten. Oleh karena itu mereka butuh bantuan BPBD tetangga dalam penanganan bencana tersebut. Seperti yang dikatakan haris mereka dalam hal ini BPBD Kab.Klaten kalau memang keadaannya sudah tidak mampu atau diatasi oleh BPBD, mereka akan mengkontak langsung dengan tetangga.

“bencana yang sangat besar misalnya bencana gempa bumi bencana erupsi merapi itu kan semuanya kan serba bingung kan semuanya karena kondisi bingung ya otomatis kita bpbd daerah ini kalau memang sudah tidak mampu ya kita minta bantuan dari tetangga sebelah kabupaten boyolali kabupaten yang lain ya jadi itu jadi satu hal prinsip dalam penanggulangan bencana ini tidak mengenal batas wilayah.”

(Wawancara Haris, Kabid. Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

B. Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Bencana

1. Kewajiban Pemerintah

Perlu untuk di ketahui bahwa indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 pada huruf (a) dijelaskan bahwa negara wajib melindungi dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam bencana. Lebih jelasnya sebagai berikut.

“bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

(UU Penanggulangan Bencana NO.24 TAHUN 2007)

Dalam turunannya undang-undang tersebut dimana tidak hanya pemerintah pusat semata yang bertanggung jawab melainkan untuk pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Seperti yang dituangkan dalam Bab III tentang tanggung jawab dan wewenang pada Pasal 5.

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

(UU Penanggulangan Bencana NO.24 TAHUN 2007)

Maka dari itu beberapa daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri termasuk Kab.Klaten memilikinya. BPBD Kab.Klaten sendiri, peneliti mendapat data wawancara dengan bapak haris bahwa bupati kab.klaten mengeluarkan peraturan tentang

penanganan kedaruratan kebencanaan disitu dijelaskan cara penanganan dan prosedurnya.

“jadi kita sudah ada jadi kabupaten klaten sudah ada peraturan bupati klaten no 7 tahun 2014 tentang penanganan kedaruratan bencana di kabupaten klaten disitu diatur tentang hal-hal yang berkaitan penanganan kebencanaan mulai dari bencana erupsi, gunung merapi kemudian bencana gempa bumi tektonik kemudian bencana banjir kemudian bencana tanah longsor dan bencana jenis lainnya, masing-masing itu sudah ada prosedurnya mulai dari baik manajemen, manajemnya dalam arti pengoragnisian pihak pihak terkait dalam penanganan kedaruratan.”

(Wawancara Haris, Kabid Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dari pasal dan peraturan bupati diatas menegaskan bahwa masyarakat dijamin dan mendapatkan hak dalam diberikan perlindungan yang aman dari bencana alam. Bentuk apa yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan informasi mengenai kebencanaan dan menyadarkan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Seperti desa 3 lereng merapi yaitu 3 desa, desa tegalmulyo, desa sidoredjo, desa balerante. Namun dari sisi menyadarkan masyarakat 3 desa tersebut tidak perlu lagi, karena kesadaran mereka terhadap bencana cukup besar malah mereka secara mandiri evakuasi sendiri ketempat yang mana telah disepakati. Hal itu diungkapkan oleh bapak harris.

“pola evakuasinya dilakukan secara mandiri artinya masyarakat dengan segala kesadarannya yang sudah sangat tinggi.”

(Wawancara Haris, Kabid Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dari sisi kesadaran masyarakat yang sudah bagus dalam bencana tersebut tentu mereka harus dibekali pengetahuan bencana seperti apa yang mereka hadapi. Sesuai dengan amanat peraturan bupati no 7 tahun 2014 tentang penanganan kedaruratan bencana. Disitu bagaimana pemerintah klaten yang melalui badan penanggulangan bencana daerah wajib memberi pengetahuan bencana-bencana apa yang berpotensi di wilayah klaten untuk bagaimana menghadapi bencana tersebut.

Peneliti mendapati bahwa pemerintah kab.klaten sudah sesuai koridor bagaimana mereka melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana. Dan masyarakatpun perlahan demi perlahan sudah sangat tinggi kesadaran mereka terhadap bencana dan mereka mau berkerjasama dengan pemerintah. Mulai program desa pesuduluran, pelatihan dan lainnya ini tentu yang lainnya dan utama adalah pemerintah selalu menginformasikan potensi bencana yang akan datang. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki kesan bahwa mereka merasa aman serta nyaman.

2. Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Di bagian ini peneliti ingin membahas atau menggali siapa yang bertanggung jawab dalam mempublikasi informasi bencana wilayah Kab. Klaten terhadap masyarakat. Seperti yang diungkapkan haris bahwa semua informasi bencana ada di pusdalops sendiri, pusdalops ini memang secara unit di manager oleh kepala bidang kedaruratan dan

logistik. Tetapi ketika data informasi tersebut di sebarakan kepada masyarakat ini yang menyampaikan adalah kepala pelaksana BPBD.

“Ya pusdalop tadi ,ini walaupun kami secara jabatan sebagai kepala bidang kedaruratan dan logistik ini otomatis selaku manager pusdalop nah jadi secara unit, unit teknis pusdalop ini ya memang menjadi tanggung jawab kami tetapi ketika keluar begitu data yang diolah ini kami sampaikan kepada pimpinan kepala pelaksana bpbd untuk dipublish kan untuk di share kan jadi kami sebagai penyaji penyaji data pada atasan.”

(Wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Untuk yang berkepentingan di lapangan dalam penanganan bencana sendiri Haris mengatakan ini adalah tugas bersama. artinya semua unsur masyarakat kabupaten klaten memiliki andil dalam penanganan bencana. Semuanya harus menyamakan pemikiran bagaimana penanganan bencana yang benar. Koordinasipun dilakukan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Koordinasi ini pun di komandoi oleh BPBD sendiri.

“Jadi 1 hal yang utama dalam penanggulangan bencana dalam penanggulangan bencana ini menjadi tugas bersama artinya pemerintah dunia usaha dan masyarakat dan di tinggal dilihat sekupnya kalau bicara nasional pastinya pemerintah pusat, kemudian pengusaha tingkat pusat kemudian dunia usaha pusat yang artinya sebagai contoh real di kabupaten klaten ya sama penangulangan bencana menjadi tugas bersama, yang mana itu mulai dari pra bencana saat bencana pasca bencana pun kita selalu untuk mengkoordinasikan, berbicara berdiskusi menyamakan pemahaman menyamakan pandangan sehingga pada saat

terjadi bencana ini bpbd artinya pemerintah daerah penanggulangan bencana ini lebih banyak sebagai komandan pemegang komando artinya yang bergerak ini ya semua pihak tadi swasta artinya dengan mungkin sumber daya alam yang dimiliki misalnya sumber daya dana dan kemudian sumber daya logistik kemudian tentunya masyarakat.”

(Wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Untuk memudahkan dalam penyaluran informasi atau koordinasi pada saat bencana tentu membutuhkan alat telekomunikasi. Biasanya BPBD menggunakan media hp aplikasi whatsapp maupun media sosial, namun bilamana sinyal hilang atau terganggu jaringan bpbd sudah mengantisipasi dengan memasang repiter radio. Seperti yang diungkapkan Haris bahwa yang menangani repiter radio tersebut BPBD di bantu oleh ORARI maupun ada rapi radio antar penduduk.

“Ada itu ada hp kita kan ada repiter di sana repiter kita pasang di wilayah gunung kidul yang mana insya allah itu no problem katakanlah seperti di lereng merapi ini sinyal agak kurang bagus kadang-kadang selain operator telkomsel, kalau kurang bagus jadi teman-teman kami yang ada di lapangan baik itu relawan kemudian pers segala macamnya ini lebih banyak menggantungkan pada radio tadi yah ht. Artinya kita anu pusdalop ini karena ada kita dibantu oleh orari yang tadi radio amatir tadi kemudian oleh rapi radio antar penduduk pokoknya semua di pusdalop ini mereka tempatkan anunya istilahnya pesawat induknya induknya untuk memantau.”

(Wawancara Haris, Kabid Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Khusus untuk bencana gunung merapi yang di kawasan rawan bencana, masyarakatnya sudah memiliki akses langsung dengan BPPTKG. Bahkan mereka memiliki sudah punya group sendiri atau lingkaran di masyarakat sendiri jadi tersampaikan semua masyarakatnya. Hal itu diungkapkan asri bagaimana masyarakat mendapatkan informasi.

“Itu selalu kita wanti-wanti untuk merujuk ke yang terpercaya dan mereka sudah, karena sangat pengalaman Merapi, mereka juga punya data, akses sendiri ke BPTKG, mereka punya grup sendiri, grup lingkaran merapi itu punya sendiri. Jadi, Jogja-Klaten-Sleman-Magelang dan Boyolali. Ada sesuai mereka juga, merapi namanya.

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

Hal ini menjelaskan bahwa baik BPBD Sleman maupun BPPTKG bisa menyampaikan informasi kebencanaan Gunung Merapi langsung ke perangkat desa atau relawan tanpa harus melalui Bupati. Namun, keaktifan atau kesiapan dalam mempublikasikan informasi kebencanaan antara BPBD atau BPPTK bisa terjadi sebaliknya. Bisa saling tukar menukar antara masyarakat dengan BPBD hal tersebut diungkapkan oleh asri dalam wawancara.

“Tapi yang penting adalah tokoh-tokoh masyarakat di kawasan rawan bencana itu kita punya kontakannya. Jadi ketika ada informasi penting atau mereka ada informasi penting, kita bisa saling tukar-menukar informasi kan. Oh

ada isu ini lho, isu misalnya isu tanggal 26 Agustus besok ada gempa, misalnya. Kita kan bisa konfirmasi. Terus kita konfirmasi ke, dianggap percaya, misalnya BMKG atau BPTKG. Jadi kayak gitu.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

BPPTKG dan BMKG adalah 2 lembaga yang beda. (BPPTKG) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, menyusun rencana dan program serta pengelolaan kerjasama dan informasi serta pelaksana mitigasi bencana Gunung Merapi sedangkan BMKG atau kepanjangannya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama pengarah informasi bila ada indikasi cuaca ekstrim maupun bencana. Hal tersebut dikatakan Asri.

“ada hal lain yang belum maksimal yaitu di terbatasnya regulasi buat radio komunitas, padahal radio komunitas masih dianggap penting oleh masyarakat terutama para orang tua.”

(wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

Selain itu ada peran yang berbeda antara BPPTKG dengan BPBD, BPPTKG adalah sebagai fasilitator, pengarah dan pemberi rekomendasi mengenai aktifitas Gunung Merapi kepada pemerintah, seperti BNPB dan BPBD. Sedangkan BPBD berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan penyebaran informasi agar sampai kepada masyarakat. Namun peneliti melihat bahwa peran BPPTKG dengan masyarakat memiliki koneksi seputar informasi kebencanaan.

B. Program dan Perencanaan BPBD Kab.Klaten Dalam Penanganan Bencana

Pemetaan wilayah yang indikasi rawan bencana, ini merupakan hal yang penting dalam upaya penanganan bencana. Dari sini kita bisa melihat wilayah mana saja yang memiliki rawan bencana. Dalam upaya pemetaannya pun dilihat dari sejarah wilayah tersebut apa sudah terjadi bencana apa belum serta dari rekan-rekan peneliti kewilayahan yang punya kemampuan dibidangnya dalam menentukan wilayah tersebut memiliki indikasi bencana.

1. Sekolah Sungai Klaten

Program sungai klaten ini merupakan suatu hal yang bagus dalam upaya menjaga sungai. Dalam arti masyarakat bisa menjaga dan merawat sungai secara kesadaran mandiri. Ini merupakan kegiatan program sekolah sungai pertama di Jawa Tengah yang dimulai pada tahun 2016. BPBD Kab. Klaten sebagai tuan rumah sekaligus pencetus sekolah sungai ini diikuti banyak relawan serta tokoh masyarakat. Mereka antusias mengikuti kegiatan sekolah sungai ini, karena ilmu yang di dapat bisa di salurkan lagi kepada masyarakat klaten sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Asri sebagai staff bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

“arti penting sekolah itu adalah menghasilkan relawan yang dapat memiliki sungai binaan. Disamping itu, kegiatan mereka akan berfokus pada upaya penyadaran masyarakat terkait pentingnya merawat sungai.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan pada paragraf di atas bahwa sekolah sungai ini bisa menjaga dan merawat sungai. Arti lengkapnya adalah masyarakat terbangun kesadaran bahwa sungai ini menjadi

tanggung jawab mereka dan bukan hanya pemerintah semata. Serta dapat pengendalian pencemaran dari limbah-limbah masyarakatnya dan berusaha menjaga sungai ini tidak degradasi. Lalu lainnya yaitu sungai ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber inovatif atau sebagai tempat wisata maupun ekonomi kreatif.



Gambar 3.1 Kegiatan sekolah sungai
(Dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

2. Desa Tangguh

Desa tangguh adalah suatu desa yang di bina dalam penanganan bencana. Jadi mereka diajarkan bagaimana evakuasi, bagaimana mereka dilatih cara penanganan menghadapi macam-macam bencana ini seperti apa, serta mereka memiliki alat pendukung penanganan bencana semacam HT alat komunikasi, akses jalan evakuasi, transportasi, ini mereka harus memilikinya. Selain itu mereka harus punya tim siaga bencana atau tim relawan, ini berguna untuk mengkoordinir masyarakat desa saat bencana akan datang. Seperti yang dikatakan ibu asri, beliau mengatakan untuk desa yang termasuk kategori wilayah rawan bencana mereka punya tidak tim siaga bencana, tim relawan bencana.

“harus seperti apa, apa saja yang harus dipunyai desa, kayak kamu punya tim siaga desa nggak, atau tim relawan bencana, apa saja, dan itu sudah ada di BMPB, terus itu yang desa tangguh.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Selain itu untuk masyarakat sendiri mereka dibekali pelatihan menghadapi bencana seperti apa. Bagaimana evakuasi harus kemana, bencana banjir, bencana angin puting beliung, dan lainnya. Seperti yang diungkapkan ibu asri bahwa BPBD Kab.klaten memberikan pelatihan terhadap masyarakat tersebut dengan ahlinya.

“Terus ada kita juga beberapa pelatihan ke desa untuk pengurangan resiko bencana ada harus pelatihan ke sekolah, SSB, sekolah siaga bencana, pelatihan ke pra sekolah.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Dalam pelatihan sendiri ada beberapa tehnik yang diajarkan, seperti bagaimana tutupi kepala, ketika gempa datang mereka harus cepat lari ke bangunan sudut, dan lainnya. Untuk memberi pelatihan kadang BPBD tidak jalan sendiri ada juga kerjasama dengan ahli diluar BPBD. Seperti yang diungkapkan ibu asri pelatihan untuk disabilitas mereka ada kerjasama dengan NGO.

“Kalau pelatihan yang kita selenggarakan sendiri itu masih murni dari, penganggarannya ya, murni dari APBD, tapi ada beberapa pelatihan disabilitas kita kerja sama, jadi kita ajukan proposal dengan pihak NGO.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Untuk sektor evakuasi masyarakat desa di wilayah rawan bencana mereka diharapkan evakuasi secara mandiri. Karena kalau tidak dan hanya menunggu tim dari BPBD itu akan memakan waktu sebab bencana alam besar akan datang dengan cepatnya. Tentu untuk evakuasi secara mandiri, mereka tidak serta merta evakuasi namun mereka sudah dibekali harus kemana evakuasi atau tempat yang aman. Seperti yang di ungkapkan bapak haris.

“pola evakuasinya dilakukan secara mandiri artinya masyarakat dengan segala kesadarannya yang sudah sangat tinggi kemudian dengan dukungan sarana, prasarana transportasinya sebgaimana diketahui diatas itu yaitu armada truk, kendaraan roda 4 itu ratusan dan itu sangat sangat memungkinkan malah sudah berlebih artinya penduduk yang harus turun mengevakuasi diri secara mandiri.”

(wanwancara Haris, Kabid.kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Tentu untuk evakuasi dibutuhkan adanya transportasi yang cukup membawa semua masyarakat wilayah bencana tersebut. Karena dibutuhkan cepat upaya untuk mengevakuasi, kendaraan ini lah yang dibutuhkan dan memadai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah alur jalan evakuasi tersebut supaya tidak ada macet yang akan menghambat evakuasi. Ini lah peran polri dan tni dalam membantu evakuasi, meraka harus sudah punya planning teknis alur kendaraan evakuasi tersebut supaya tidak tersendat dengan alur berlawanan. Hal itu diungkapkan bapak haris.

“tranportasinya sudah sudah lebih dari cukup malah lebih, malah kelebihan kemudian kluster

sektor selanjutnya sektor transportasi yang kami sampaikan yang mana disini tni, polri, bpbd, pmi ini sudah kita koordinasikan semua yang artinya berbagi peran. tni, polri yang pasti menjaga keamanan di wilayah desa yang ditinggalkan oleh masyarakatnya, yang juga akan mengamankan proses perjalanan evakuasi dari atas menuju shelter atau barak pengungsian tersebut. kemudian pmi pastinya mendukung dalam rangka menyediakan apa itu? Sarana prasarana seperti ambulance kemudian hal yang lainnya, yang lebih penting lagi yaitu koordinasi tingkat lapangan yang mana pada proses evakuasi mandiri masyarakat turun yang sendrinya menuju barak shelter pengungsian itu tidak terjadi arus sebaliknya dari bawah menuju keatas, jadi kita sudah susun yaitu jalur yang sudah kita tentukan posisi kordinatnya.”

(wanwancara Haris, kbid. Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Nah untuk evakuasi pasti ada tujuan kemana mereka harus evakuasi, disini BPBD sudah mempersiapkan betul bagaimana mereka harus evakuasi kemana. Khususnya untuk bencana merapi dibuatlah posko kedaruratan atau barak pengungsian. Barak pengungsian ini, BPBD Kab.klaten sudah mempersiapkan barak shelter pengungsian secara permanen. Barak ini memang khusus bagi wilayah klaten yang berdekatan dengan gunung merapi jadi desa tersebut akan di evakuasi ke desa tetangganya yang memang jauh dari radius merapi atau kategori aman. Hal itu diungkapkan bapak haris, bahwa desa tersebut sudah dibuat terencana.

“barak atau pengungsian yang mana sektor barak yang ada di kabupaten klaten ini ada 3 jadi ada 3 desa kawan rawan bencana klaten , yang sebelah timur itu namanya desa tegalmulyo, desa tegal mulyo ini diarahkan untuk nanti ke shelter kebarak pengungsian di desa demak hijau kecamatan ngarangnongko kemudian desa

sidorejo itu posisi desa yg di tengah itu diarahkan nanti ke barak di desa menden kecamatan kebonarum kemudian berikutnya yang paling barat itu.. perbatasan dengan kabupaten sleman yaitu desa balerante . ketiga desa itu semuanya di kecamatan kemalang, desa balerante nanti masyarakatnya kita arahkan shelter barak pengungsian di desa kebondalemalar kecamatan prambanan, jadi artinya semua sudah terencana, shelter itu terbuat bersifat permanen.”

(wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Selain itu tidak hanya evakuasi manusianya saja, BPBD Kab.Klaten mengevakuasi juga ternak hewan yang dimiliki masyarakat tersebut. Hal ini jadi perhatian BPBD karena masyarakat tersebut tidak mau evakuasi kalau ternak hewan tersebut tidak dibawa olehnya. Hewan tersebut diantaranya seperti sapi, kerbau, kambing. Bahkan kandangnyapun disiapkan oleh BPBD di dekat pengungsian posko masyarakat tersebut. Hal itu diungkapkan oleh bapak haris dalam wawancaranya.

“apa ituu sektor pternakan yang mana salah satu harta kekayaan masyarakat lereng merapi itu adalah hewan hewan ternak yang khususnya sapi dan kambing ini, semua pada saat masyarakat evakuasi , ternaknya juga kita evakuasi otomatis kita juga sediakan kandang kandang sementara yang berdekatan shelter atau barak pengungsian di ketiga titik tersebut.”

(Wawancara Haris, Kabid.kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Bahkan BPBD mempersiapkan bagaimana hewan ternak itu bisa di cover oleh asuransi. Hal ini dikatakan oleh bapak wahyudi sebagai kabid rehab dan rekonstruksi. Namun hal tersebut belum

dapat titik terang sampai menjalin komunikasi dengan dinas peternakan maupun swasta.

“ternak-ternak yang pernah kita bina ada tindak lanjutnya tidak sekarang merapi mau meletus lagi apa mereka bingung gimana permasalahannya bagaimana supaya bisa nyaman ngungsi bersama sapinya lagi ini misalnya, kayak gitu harus dirancang, saya sempat berpikir kalau misalnya menjalin hubungan dengan pihak swasta yang siap misalnya sebelum ada erupsi itu sapinya bisa dijual dengan harga yang baik misalnya, sekarang kami punya program pelatihan untuk para ternaknya kemudian saya coba nanti bisa di join kan kondisi darurat kira-kira ada yang mampu penjualannya atau enggak tapi emang agak sulit emang saya tanya tanya kemarin belum ada pengungsi yang fix tapi saya berpikir kalau bisa di cover oleh asuransi sampai saat ini belum titik terang, saya sudah menjalin dengan dinas peternakan itu salah satu kalau bencana merapi.”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Untuk sektor pertanianpun BPBD mencoba membantu bagaimana pertanian tersebut bisa di asuransikan. Karena kan dampak bencana terhadap pertanian itu bisa parah kerusakannya dan pertanian tersebut kan memang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seperti yang diungkapkan bapak wahyudi. Namun hal tersebut dinas pertanian sudah terlebih dahulu melakukan asuransi terhadap pertanian masyarakatnya.

“respon kerugian terbesar yang di pertanian tapi ternyata pertanian sudah terasuransian masyarakat sudah dibilang oleh dinas pertanian mereka punya asuransi.”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)



Gambar 3.2 Pelatihan Relawan Desa
(Dokumentasi BPBD kab.Klaten)

3. Desa Bersaudara

Untuk desa bersaudara atau pasaduluran ini diterapkan oleh BPBD Kab.Klaten buat wilayah mereka yang dekat dengan kawasan gunung merapi. Seperti yang dikatakan bapak haris terdapat 3 desa yang masuk wilayah klaten ini sebagai wilayah rawan bencana.

“wilayah yang ada di kawasan rawan bencana 3 lereng merapi yaitu 3 desa, desa tegalmulyo, desa sidoredjo, desa balerante.”

(Wawancara Haris Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

konsep dalam membentuk desa bersaudara ini adalah untuk beberapa desa di kabupaten Klaten yang termasuk sebagai kawasan

rawan bencana dan akan disaudarakan dengan desa terdekat yang tidak termasuk kawasan rawan bencana.

“kabupaten klaten ini ada 3, jadi ada 3 desa kawan rawan bencana klaten, yang sebelah timur itu namanya desa tegalmulyo, desa tegal mulyo ini diarahkan untuk nanti ke shelter kebarak pengungsian di desa demak hijau kecamatan ngarangnongko, kemudian desa sidorejo itu posisi desa yg di tengah itu diarahkan nanti ke barak di desa menden kecamatan kebonarum, kemudian berikutnya yang paling barat itu perbatasan dengan kabupaten sleman yaitu desa balerante. ketiga desa itu semuanya di kecamatan kemalang, desa balerante nanti masyarakatnya kita arahkan shelter barak pengungsian di desa kebondalemalor kecamatan prambanan, jadi artinya semua sudah terencana.”

(Wawancara Haris, Kabid kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dari sini memang diharapkan bisa terjadi kerjasama yang baik antara desa tersebut. Dari desa yang dijadikan tempat buat posko barak pengungsian dengan desa yang di kategorikan kawasan rawan bencana mereka dapat menerima dengan terbuka seperti arti sebuah saudara. Selain itu bukan hanya tempatnya jadi pengungsian namun bisa mengurangi ke khawatiran masyarakat dan kepanikan dalam proses dimana mereka harus evakuasi. Yang lainnya adalah untuk memudahkan pemerintah dan lainnya dalam pelayanan pengungsi. Dan terakhir adalah memudahkan perangkat desa tetap menjalankan kerjanya.

“satu hal yang kita kedepankan yaitu antara desa asal pengungsi ketiga desa tadi kita hubungkan kita saudarakan dengan desa dimana lokasi shelter itu berada. antara pemerintah desan beserta tokoh tokoh masyarakat di kedua desa ini kita saudarakan kita pertemukan kita koordinasikan yang dalam bahasa di klaten ini namanya desa

pasaduluran sama juga dengan desa lainnya. itu semua sebagai contoh untuk penanganan kedaruratan untuk erupsi merapi sama nanti prosedurnya yang jelas kita satu komando.”

(Wawancara Haris Kabid.kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

C. Komunikasi dan Implementasi BPBD Kab.Klaten dalam Penanganan Bencana

1. Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOPS)

Pusdalops adalah suatu ruangan yang berisi alat-alat perangkat yang mendukung penanganan bencana BPBD Kab.Klaten.

“Ada perangkat lunak, perangkat keras, ruangan, dan personel maupun manajemen di sana. Itu untuk menentukan langkah-langkah yang ada di sana.”

(wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

seperti yang disampaikan pak haris pusdalops ini mengelola informasi data perkembangan atau apapun. Jadi dari informasi yang di dapat itu akan di sampaikan lagi ke publik.

“nah di dalam bpbd itu ada namanya pusat pengendalian operasi (pusdalops), pusdalop ini yang mengelola informasi data perkembangan atau apapun, jadi data yang masuk itu kita kelola kita analisis kemudian kita sampaikan lagi.”

(Wawancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Dalam tugasnya pusdalops ini di bagi tiga kegunaannya yaitu pada sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Pada sebelum bencana pusdalops BPBD Kab.klaten ini memberikan dukungan kegiatan bagi masyarakat, pada saat sebelum bencana apa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berupa pengumpul, penyaji data, pengolah serta informasi kebencanaan secara rutin. Pada saat bencanapun pusdalops ini memberikan dukungan pada Posko barak kedaruratan yang sebelumnya sudah dibuat maupun dadakan dalam artinya pusdalops sebagai penyalur pusat informasi ketika barak posko pengungsian membutuhkan apa.

Lalu pelaksanaan kegiatan darurat, jadi pusdalops yang merupakan sebagai komando sekaligus menerima data semua kebencanaan disini. Seperti yang dikatakan pak haris semua data seperti korban jiwa, jumlah luka ringan dan lainnya ini akan dilarikan ke pusdalops.

“komunikasi dan segala macamnya artinya begitu saat terjadi korban itu dari ini di lapangan ini dari sar tni-polri ini semua data akan dilarikan ke bpbd kapusdalops tadi yang mengendalikan operasi ini, jadi pusdalop ini menerima mengolah mesituasikan menyampaikan keluar lagi tentang informasi yang dipublikasikan secara resmi jadi informasi secara resmi dari pemerintah daerah ini khususnya di bpbd ini hasil tadi dari pusdalops.”

(Wawancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 Agustus 2018)

Pasca Bencana memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi artinya wilayah yang terkena bencana alam tentunya wilayah tersebut akan dibangun kembali. Dalam membangun kembali tentu membutuhkan data kerusakan-kerusakan apa saja yang diakibatkan bencana dan disinilah pusdalops perannya sebagai informasi lengkap. Dalam BPBD Kab. Klaten sendiri menurut bapak wahyudi yang merupakan kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi mereka terjun langsung

pada saat bencana dan sekaligus mendata lokasi serta area terkena bagaimana lalu dibuat laporan yang namanya jitupasna.

“pada masa kedaruratan pun kami memperbuat diri sambil melakukan pertolongan pertolongan darurat sampai logistik dan sebagainya bagaimana bencana merapi itu ditampung di shelter dan sebagainya kami sudah harus terjun disitu untuk mendata semuanya korbannya berapa lokasinya di mana dan area terkena bagaimana adjustment kami sudah lakukan di sana sehingga itu kami jadikan laporan secara menyeluruh dengan begitu nanti kita bisa buat laporan yang namanya jitupasna semacam kajian itu isinya jitupasna itu intinya adalah kita untuk melihat ya kerusakannya seberapa korbannya seberapa kemudian kerugian yang ditimbulkan berapa.”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Ada hal yang perlu diketahui bahwa dalam hal kerusakan yang diakibatkan bencana dengan kerugian. Bahwasannya kerusakan bisa berupa kerusakan konstruksi sarana dan prasarana, sedangkan kerugian adalah bisa diakibatkannya dari kerusakan tersebut sehingga membuat manusia tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Analoginya adalah seorang petani memiliki sawah, ketika banjir melanda sawah tersebut dan itu mengakibatkan sawah tersebut rusak, inilah yang membuat kerugian karena sawah tersebut merupakan mata pencaharian petani. Seperti yang dikatakan bapak wahyudi bahwasannya kerusakan dan kerugian itu beda karena beliau orang tehnik dan ini yang dipahami beliau.

“agak beda ya antara kerusakan dan kerugian itu di kami itu agak beda dulu saya orang tehnik kerusakan-kerusakan tapi di sini harus melihat kerugian, kerugian itu bisa ditimbulkan kerusakan yang ada baik manusianya baik prasarannya baik rumah-rumahnya dampak kerusakan yang yang

ada itu kan akan menimbulkan kerugian dengan lain, misalnya saja satu jembatan putus karena banjir ya selama berapa waktu itu nanti akan dibangun dengan begitu orang akan mengakses jalan lain jalan pertanian dan itu akan menjadi nilai ekonomi sampai ke sana”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)



Gambar 3.3 Ruang Pusdalops
(dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

2. Pertemuan Relawan

Relawan-relawan yang tersebar di Klaten itu jumlahnya sudah ada ratusan. Mereka ini jadi relawan atas dasar keinginan sendiri serta memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Banyak organisasi, komunitas maupun ormas besar di klaten memiliki tim relawan penanganan kebencanaan. Bahkan ormas besar seperti muhammadiyah mereka memiliki LPB lembaga penanggulangan bencana dan dilamnya banyak divisi bagian-bagiannya seperti evakuasi, dapur umum, kecelakaan air dan lainnya. Ini menandakan bahwa masyarakat diluar non pemerintah memiliki sumbangsih yang besar terhadap masyarakat lagi. Seperti yang dikatakan pak

haris beliau mengatakan saking banyaknya relawan beliau tidak terlalu banyak yang hafal nama-nama dari relawan ini, tetapi sudah tercatat di data BPBD Kab.Klaten.

“sedang kan yang bener-bener jadi swasta partikelir yang tumbuh dari masyarakat macam-macam katakanlah seperti di sini ada yang namanya relawan semut geni relawan komunitas tanggap bencana relawan klaten timur, banyak mas jadi ada ratusan relawan kami terus terang tidak hafal, apa yang jelas yang gede itu boleh dikatakan yang punya lembaga-lembaga ormas misalnya lpb lembaga penanggulangan bencana muhammadiyah itu sangat mereka punya berbagai divisi yang itu mulai dari evakuasi kemudian dapur umum kemudian kecelakaan air kecelakaan gunung dan segala macam dan itu yang punya ormas muhammadiyah.”

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Dalam upaya mensinergikan pikiran antara BPBD Kab.Klaten dengan relawan-relawan kebencanaan dibutuhkan adanya pertemuan secara berkala. dalam arti setiap ada pembaruan teknis maupun ilmu baru dalam penanganan bencana harus ada sosialisasi dengan relawan tersebut. Bahkan lebih dari itu setiap pertemuan dengan relawan diharapkan bisa saling mengenal, lebih bersahabat antara pemerintah dengan non pemerintah. Seperti yang dikatakan Haris yang merupakan kabid kedaruratan dan logistik dan sekaligus komando dari bpbd kab.klaten dengan para relawan mengatakan mereka bisa melaksanakan pertemuan relewan 3 bulan sekali.

“kami setiap 3 bulanan mengagendakan pertemuan rutin relawan sekabupaten klaten pertemuan 3 bulanan ini sebagai bagian untuk selalu mengkomunikasikan berbagai hal katakanlah mulai dari segi aturan kemudian dari

apa itu tingkat kerawanan bencana kemudian hal-hal peralatan yang kita buktikan dan semuanya jadi kita sifatnya untuk mengkomunikasikan secara aktif menjaga perasaan pemikiran dan pandangan ini dengan teman teman relawan yang mana sekali lagi saya sampaikan di lapangan ini relawan inilah yang luar biasa kontribusinya jadi begitu”.

(wanwancara Haris Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

3. Pelatihan mitigasi Ke Sekolah, Puskesmas, Dunia Usaha, Dan Rumah Sakit.

Pelatihan mitigasi yang dilakukan BPBD Kab.Klaten adalah meningkatkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat dalam menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi bencana alam. Dan sarannya selain desa pada bab diatas, mereka melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah mulai dari paud sampai sma sekolah menengah atas, selain itu ada instansi-instansi lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, dunia usaha, seperti yang dikatakan asri.

“terus ada kita juga beberapa pelatihan ke desa untuk pengurangan resiko bencana ada harus pelatihan ke sekolah, ssb, sekolah siaga bencana, pelatihan ke pra sekolah, jadi kalau yang di sampingnya kontor BPBD itu ada”.

(wawancara Asri staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Ada beberapa materi mitigasi bencana ini untuk diajarkan, karena setiap bencana berbeda itu akan beda juga cara penyelamatannya bagaimana. Seperti gempa bumi misalnya, ketika kita sedang berada di gedung dan gempa bumi datang hal pertama yang kita lakukan adalah tutupi kepala lalu pergi ke sudut ruangan

gedung tersebut. Berbeda dengan tsunami datang, kita diharuskan lari ke patokan jalur evakuasi yang sudah disediakan pemerintah sebelumnya.

“ Jadi buat anak pra sekolah, TK, paud, jadi pelatihan bencana buat anak-anak. Kalau gempa itu harus gimana adik-adik? Tutupi kepala, terus ada lari-lari gitu ke rumah gempa. Ada angin gimana, kalau banjir gimana, kasih film. Medianya banyak.”

(Wawancara Asri, staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)



Gambar 3.4 Pelatihan Mitigasi Pelajar Sekolah
(Dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

4. Unit Layanan Disabilitas

Unit layanan disabilitas ini merupakan peraturan tindak lanjut dari pusat yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomer 14 tahun 2014. Untuk mereka BPBD di wilayah kota maupun kabupaten mereka harus menerapkan program ULD ini. Di kabupaten klaten sendiri penyandang disabilitas ini cukup banyak bisa sampai belasan ribu. BPBD Kab.Klaten sendiri sebelumnya sudah mempunyai relawan disabilitas ini, namun

semenjak adanya ULD ini jadi membuat mereka lebih paham lagi ilmu penanganan bencana bagi penyandang disabilitas.

Menurut ibu asri yang merupakan bagian staff bid.pencegahan dan kesiapsiagaan mengatakan bahwa ULD ini diikuti relawan penyandang disabilitas yang lalu mereka dilatih bagaimana pertolongan pertama, evakuasi tekniknya, maupun micro teaching.

“melalui pelatihan tersebut mereka diharapkan bisa memberikan pelajaran tentang PRB ini kepada penyandang disabilitas lainnya.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Dalam pelatihan waktu itu ada sekitar 25 orang penyandang disabilitas yang jadi sukarelawan. Disini mereka bagaimana diajarkan materi penanggulangan bencana dan disalurkan kembali ilmu ke masyarakat penyandang disabilitas lagi. Karena untuk bisa pahami apa saja kebutuhan mereka ya dari sesama penyandang disabilitas. Hal tersebut diutarakan oleh ibu asri.

“itu dia kami memperhatikan mengapa relawan penyandang disabilitas ini dilatih wawasan penanganan bencananya dan serta sebelumnya memang datang dari kemauan mereka sendiri.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Penyandang disabilitas mereka ini tersebar berbagai tempat di daerah kabupaten Klaten. Serta kabupaten Klaten ini memang wilayah yang rawan dengan potensi berbagai jenis bencana, ntah itu erupsi merapi, puting beliung, banjir dan lainnya. Penyandang disabilitas ini memang paling rentan untuk risiko bencana.

“kami punya datanya kelompok disabilitas ini memang ada tersebar di berbagai wilayah di klaten ini.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Untuk dari penanganan antara kelompok disabilitas dengan kondisi manusia yang biasa itu berbeda. Karena kan untuk penanganan disabilitas dibutuhkan teknis yang berbeda dan setiap disabilitas mempunyai karakter yang beda. Ini yang dijadikan dalam membuat sistem peringatan dini atau (EWS).

“harus diketahui juga sih peringatan dini untuk tunanetra sama rungu kan berbeda ya mas. Jadi ya tentu juga dalam membuat EWS buat mereka ya harus disesuaikan.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)

Penekannya juga harus begitu, kalau kita pukul rata evakuasi dengan yang lainnya. Tentu ini membuat masalah baru buat penanganan bencana. Seperti yang dikatakan asri, dari segi posko atau shelter ini mereka harus menyiapkan tempat yang ramah buat disabilitas ini.

“bisa dibayangin ga mas, pada saat kita evakuasi disabilitas ini contohnya kita angkat orangnya, sedangkan kusi rodanya tidak kita bawa? Ya jelas itu berbahaya kan. Jadi ya harus jadi satu bawanya.”

(Wawancara Asri, Staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 29 Agustus 2018)



Gambar 3.5 Pelatihan Relawan Disabilitas
(Dokumentasi BPBD Kab.Klaten)

5. Tim Reaksi Cepat

Dalam mengatasi sesuatu penanganan bencana dibutuhkan adanya suatu tim yang berisikan orang-orang kompeten dalam bidangnya untuk penanganan bencana. Dalam tim ini harus bisa memahami tugas dan sop yang disepakati sebelumnya dalam teknis kebencanaan. Dalam BPBD Kab.Klaten sendiri mereka memiliki tim yang namanya TRC tim reaksi cepat. TRC ini beranggotakan 31 orang dimana mereka dibagi beberapa shift bergiliran untuk standby ketika ada bencana alam datang. Seperti yang dikatakan bapak haris tim diharapkan bisa secara cepat kerjanya ketika informasi bencana datang.

“tadi saya sampaikan cara formalnya bpbd ini punya unit yang itu langsung bergerak langsung ke pada saat darurat yang dinamakan trc tim reaksi cepat, tim reaksi cepat ini beranggotakan 31 orang atau satu peleton.”

(Wawancara Haris, Kabid.Kedaruratan Dan Logistik, 31 agustus 2018)

Dalam teknisnya secara detail, tim TRC ini dalam 24 jam dibagi 3 shift bergantian. Satu shiftnya yaitu 8 jam, dalam masa shiftnya ketika ada bencana maupun tidak tetap mereka diharuskan dicatat dalam buku laporan dan berlaku juga untuk shift selanjutnya. Itu semua jelaskan oleh bapak haris.

“31 orang ini dibagi tiga shift penugasan masing-masing 8 jam jadi di poskonya ini tim reaksi cepat itu selalu ada yang terjaga jadi piket, jadi tidak harus 31 orang itu berjaga semua, nggak. artinya ada 5,6 itu setiap katakanlah ini jam jam jaganya mulai jam 07.00 sampai jam 15.00 8 jam kan itu diisi 5 sampai 6 orang ya udah jadi pada saat jam 15 pergantian shift nah penyerahan katakanlah hasil selama 8 jam di pagi ini melaporkan misalkan situasi aman terkendali atau kan misalkan ada terjadi apa dan semua dicatat dalam buku buku laporan kejadian nah nanti tim berikutnya bekerja itu nanti pada saat selesai jadi tidak akan terputus komunikasinya.

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Untuk tugas dan fungsinya sendiri mereka akan mengkoordinasikan langsung dengan relawan-relawan terdekat dengan lokasi bencana. serta menganalisis bencana yang terjadi itu apa, lalu mendata logistik yang dibutuhkan apa saja serta mengevakuasi masyarakat ke wilayah yang aman dan sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan bapak haris.

“melakukan pengkajian tentang jenis bencana dampak bencana kerugian bencana kerugian jiwa kerugian harta dan juga kajian kebutuhan yang dibutuhkan hal-hal dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan jadi pada saat terjadi bencana kami bpbd itu langsung menegaskan tim reaksi cepat itu untuk langsung secepat-cepatnya turun lapangan dan melakukan kajian tadi kajian tentang jenis dampak bencana korban jiwa kerugian harta benda dan sejenisnya serta hal-hal kebutuhan apa

saja yang harus dipenuhi secepat-cepatnya pada saat kondisi darurat.”

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Seperti yang dijelaskan paragraf diatas, TRC ini melakukan koordinasi dengan relawan-relawan yang dekat dengan lokasi bencana. Mereka ini sudah saling kerjasama antara pemerintah dengan non pemerintah serta BPBD sendiri mempunyai data daftar relawan tersebar se kabupaten klaten. Tentu dalam penanganan pemerintah tidak bisa sendiri dan butuh dukungan relawan inilah dalam membantu penananganan bencana yang cepat. Hal ini diutarakan Haris sebagai kabid kedaruratan dan logistik.

“kemudian pada saat penanganan di lapangan tim reaksi cepat atau trc ini tadi sudah punya jaringan lembaga lembaga relawan yang mana itu tumbuh pesat di masyarakat artinya kita kan punya bank data database relawan relawan yang ada di klaten artinya pada saat tim reaksi cepat ini turun ke lapangan mereka pun langsung refleksi akan mengontak relawan lembaga relawan di lokasi bencana yang bersangkutan katakanlah di kecamatan x ini terjadi misalnya bencana angin ribut langsung menuju secepat-cepatnya ke lokasi tempat kejadian di dalam perjalanan ke sana itu langsung kontak lembaga atau sukarelawan yang ada di lokasi tersebut jadi prinsipnya begitu.”

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

Selain itu pemerintah tidak serta merta hanya BPBD saja untuk urusan kebencanaan, mereka bahkan mempunyai SAR search and rescue. SAR ini dibentuk untuk spesialisasi pencarian korban bencana alam dan pertolongan. Yang lainnya adalah Istana PMI Taruna Siaga Bencana serta ada dari TNI, Kepolisian, mereka

inilah dari pemerintah untuk bantu bersama dengan BPBD Kab.Klaten. Tapi dalam urusan komando dalam kebencanaan tetap dipegang oleh BPBD Kab.Klaten sendiri, seperti yang diungkapkan Haris.

“Oke jadi misalnya korban jiwa , ini kan yang pertama akan pertama duluan maju itu adalah sar search and rescue SAR kan yang memang lebih banyak titik fokusnya di tim penyelamatan dan pencarian oke di dalam prakteknya di dalam tugasnya dalam operasinya sar pastinya akan mempunyai komando yaitu bpbd kemudian dibantu oleh tni polri kemudian relawan apa itu komunikasi dan segala macamnya artinya begitu saat terjadi korban itu dari ini di lapangan ini dari sar tni-polri ini semua data akan dilarikan ke bpbd ke pusdalops tadi yang mengendalikan operasi ini.”

(wanwancara Haris, Kabid.Kedaruratan dan Logistik, 31 agustus 2018)

D. Evaluasi Program Penanganan Bencana BPBD Kab.Klaten

Dalam menentukan evaluasi program tentunya membutuhkan data yang akurat dari internal. Itupun berlaku bagi evaluasi program penanganan bencana terutama BPBD Kab.Klaten. Mereka mempunyai yang namanya jitupasna, apa itu jitupasna adalah semacam mengaudit atau bahasa ringannya adalah menghitung. Apa saja yang dihitung dalam jitupasna itu melingkupi berupa data korban yang meninggal, luka berat, luka ringan lebih dalam lagi sebenarnya dalam mengklasifikasikan masyarakat yang korban dari bencana alam. Selain itu menghitung area terkena dampak dari bencana alam itu bagaimana. Melingkupi infrastruktur umum, sekolah, rumah, dll. Selain itu adalah menilai bencana alam tersebut bagaimana bisa terjadi secara ilmiah apa penyebabnya dan bagaimana teknis terjadinya. Seperti yang dikatakan

Ahmad yang merupakan kabid rehabilitasi dan rekonstruksi beliau sudah terjun langsung pada saat terjadi bencana.

“pada masa kedaruratan pun kami memperbuat diri sambil melakukan pertolongan-pertolongan darurat sampai logistik dan sebagainya bagaimana (masyarakat) bencana merapi itu ditampung di shelter dan sebagainya kami sudah harus terjun disitu untuk mendata semuanya, korbanya berapa, lokasinya dimana dan area terkena bagaimana. Adjustment kami sudah lakukan di sana sehingga itu kami jadikan laporan secara menyeluruh dengan begitu nanti kita bisa buat laporan yang namanya jitupasna.”

(wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Dari setelah bencana alam yang besar terjadi misalnya bencana gunung merapi maupun gempa pasti akan ada dampaknya terhadap prasarana dan sarana. Ini lah yang dipikirkan masyarakat terutama pemerintah untuk bagaimana membangun kembali wilayah tersebut. Dalam hal ini juga BPBD Kab.klaten terutama bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas selain pemulihan healing atau trauma di masyarakat mereka membuat rencana aksi atau disingkat renaksi ini menyusun 3, 4 tahun setelah pasca bencana. seperti yang diungkapkan Wahyudi bahwa selain prasarana dari sisi sektor ekonomi juga kita memikirkan pemulihannya.

“Itu cara berpikir kami seperti itu belum lagi pemulihan ekonominya belum lagi pemulihan trauma healing nya itu ya yang kami lakukan di situ membangun sosial ekonomi seiring dengan prasarana jadi bangun itu seperti apa setelah itu kami susun dalam jitupasna itu yang disebut dengan ren aksi rencana aksi ya itu bisa 3 tahun sampai 4 tahun setelah pasca bencana itupun seperti merapi sekarang ada kekurangan yang disana yang bisa kami lakukan. misalnya jalur evakuasi sekarang perlu dibangun lagi kemudian dulu ternak-ternak yang pernah kita bina ada tindak lanjutnya tidak sekarang merapi mau meletus lagi apa mereka bingung gimana permasalahannya bagaimana supaya bisa nyaman ngungsi bersama sapinya lagi ini misalnya, kayak gitu harus dirancang, saya sempat berpikir kalau misalnya menjalin hubungan dengan pihak swasta yang siap misalnya sebelum ada erupsi itu sapinya bisa dijual dengan harga yang baik misalnya”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Untuk teknis bantuan dari luar ketika pasca bencana menimpa klaten, seperti organisasi NGO menangani pemulihan healing dan trauma dan organisasi-organisasi relawan lainnya mereka diharuskan berkoordinasi dengan BPBD Kab.Klaten yang sebagai komando utama penanganan Bencana kabupaten Klaten.

“ Pada saatnya terjadinya bencana, biasanya nanti akan ada baik itu NGO atau bantuan dari luar yang memang spesialisasinya seperti itu. Semua kalau bantuan dari luar harus koordinasi dengan BBPD.”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

1. Hambatan dan Kritik Atas Pola Komunikasi Penanganan Bencana

Dari semua data wawancara yang peneliti dapat, menemukan beberapa hambatan di pola komunikasi informasi yang terdapat di masyarakat sendiri. Peredaran informasi yang sangat cepat karena ditunjang dengan media sosial bisa oleh masyarakat sendiri. hal ini terkadang yang membuat baik dalam penyebaran informasi kebencanaan secara cepat namun disisi lain dapat juga informasi tersebut tidak valid.

Kenapa penyebaran informasi dari masyarakat tidak valid karena mereka tidak serta merta dahulu untuk teliti dalam menangkap berita. Karena dibutuhkan sumbernya dari mana, apakah sumber tersebut resmi dari pemerintah, yang lainnya adalah waktu kejadian dan lokasi kejadian. Masyarakat sendiri masih suka panik ketika menerima informasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Asri.

“jadi sudah sangat dinamis model komunikasinya, karena media perkembangan zaman. Disini

terkadang masyarakat suka salah menyebarkan informasi tersebut.”

(Wawancara Asri, staf Kabid. Pencegahan dan kesiapsiagaan, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan data peneliti peroleh didapatkan namun memang ini hambatan yang berbeda bahwa pengalaman sebelumnya BPBD sulit untuk mengevakuasi masyarakatnya kerana berdalih mereka ingin mengungsi dengan ternaknya. Hal ini menjadi perhatian pada saat itu yang membuat BPBD sebuah solusi dengan membuat kandang sementara di barak pengungsian desa peseduluran.

“iyah waktu itu kamu menemui kesulitan, karena toh masyarakatnya bersikeras ingin dengan ternaknya dibawa sekalian untuk mengungsi.”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

Ada sisi menarik bagi peneliti yaitu warga yang disekitar KRB atau kawasan rawan bencana ini mereka masyarakatnya makmur. Terlihat dari mereka memiliki kendaraan bahkan truk yang lumayan banyak, hal itu dituturkan oleh Wahyudi bahwa masyarakat tersebut meminta lahan parkir untuk kendaraan pada saat evakuasi.

“jadi mereka bisa evakuasi secara mandiri karena sekarang daerah makmur, daerah merapi tuh sekarang daerah makmur , karena jualan pasir di sana batu sekarang ini bisa dikasih contoh ya satu desa panggang satu itu saja tidak terlalu besar daerah ke atas sana itu punya truk 1 desa punya 50.

itu belum menyangkut banyak segitu itu jangan heran mereka mengungsi pakai pajero ya begitu situasinya bisa begitu pada saat kita suplai makanan misalnya belum tentu mereka cocok sebab nyawa juga.”

(Wawancara Wahyudi Kabid. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 31 Agustus 2018)

